



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Siaran Pers,
10 February. 2007

JSMP- Unit Keadilan bagi Perempuan dan VSS, mengikuti Konferensi Jaringan Kerja Fokus Thailand 2007.

Pada bulan Januari 2007, dua orang staf nasional dari JSMP, mewakili Women Justice Unit (WJU) dan Victim Support Service (VSS), melakukan lawatan ke Thailand untuk mengikuti “Konferensi Jaringan Kerja Fokus 2007. Maria Agnes Bere, SH and Luis Oliveira, SH.

Konferensi tersebut merupakan sebuah tempat pertemuan bagi patner projek FOKUS di Asia dan Timur tengah dan organisasi patner Norwegia. JSMP-WJU patner organisasi Norwegia, Perwakilan Organisasi Pengacara Perempuan Norwegia” memberikan dukungan bagi staff kami selama pertemuan berlangsung.

Plataform Pemerintah Norwegia adalah meningkatkan usaha Norwegia untuk meningkatkan sebuah keadilan di dunia. Penerapan Resolusi Badan Kaamanan PBB 1325 (2000) mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan merupakan bagian dari komitmen ini. Pemerintah Norwegia akan meningkatkan usahanya baik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi militer dan sipil, menciptakan perdamaian dan membangun perdamaian, dan untuk mengembangkan perlindungan akan hak perempaun atau perempuan dalam wilayah konflik.

Fokus, Forum bagi Perempuan dan Pembangunan merupakan sebuah organisasi yang menangani masalah-masalah perempuan dan merupakan badan kordinasi bagi organisasi perempuan di Norwegia. FOKUS berniat untuk memperkuat Hak Asasi Manusia, berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Perempaun (CEDAW).

Konvensi tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah universal terlepas dari etnis, keyakinan atau gender. Selanjutnya konvensi tersebut menyatakan bahwa perempaun berhak untuk berpartisipasi dalam bidang social, ekonomi, politik dan budaya yang sama derajatnya dengan laki-laki.

Organisasi Pengacara Perempuan Norwegia didirikan pada tanggal 12 Mei 1947, untuk membentuk sebuah forum pendukung yang memasuki atau mencoba memasuki dalam komunitas yang didominasi oleh laki-laki yang bekerja di bidang hukum.

Kepemimpinan dari organisasi melihat NKJF sebagai sebuah wadah untuk melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hukum dan tema-tema yang ada hubungan dengan profesi mereka. Dan sebagai sebuah tempat pertemuan untuk melakukan hubungan dengan

pengacara perempuan lainnya yang berasal dari institusi pemerintah, polisi, pengadilan dan lembaga bantuan hukum dan lembaga lain serta praktek privat yang dalam Negara dan luar negeri. Pada saat ini, organisasi memiliki kira-kira 650 anggota seluruh Norwegia.

WJU-JSMP melalui pemantauan persidangan, menulis analisis hukum dan laporan tematik terhadap pembangunan sistem peradilan secara keseluruhan, JSMP membantu Pemerintah Timor Leste, masyarakat Timor Leste dan masyarakat internasional dengan memberikan rekomendasi akan perubahan pada masalah-masalah yang ditemukan. Tujuan utama dari JSMP adalah untuk meningkatkan kualitas peradilan yang disediakan oleh sistem peradilan baru saja dibentuk, dan untuk meningkatkan hak asasi manusia dan perundang-undangan dengan cara-cara yang transparan dan berarti bagi masyarakat Timor Leste. WJU melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan rumah tangga dan penyerangan seksual; dan melakukan pembelaan akan hak perempuan, khususnya “Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga” bagi Timor Leste.

Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk memberikan hal-hal praktis bagi para peserta yang mana bermanfaat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan sebagai sebuah platform bagi jaringan kerja dan kemungkinan untuk menjalin kerjasama di masa mendatang antara Negara, kawasan dan organisasi.

Kerangka tematik bagi konferensi tersebut adalah “Perempuan dalam dan setelah perang dan konflik”, terfokus pada peranan perempuan dan organisasi perempuan dan partisipasi selama dan setelah situasi konflik.

Metodologi yang ada dalam konferensi dan lokakarya, berakhir dengan menghasilkan sebuah resolusi mengenai hikmah yang diperoleh dari konferensi, rencana di masa mendatang dan evaluasi.

Sumber ide-ide dan topic yang didiskusikan dalam lokakarya tersebut adalah:

- 1) Bagaimana anda menerapkan Resolusi 1325 pada pekerjaan yang anda lakukan? Berikan tantangan yang anda hadapi dan saran untuk ke depan?
- 2) Lihat resolusi PBB 1325 dan berikan pendapat apakah resolusi ini dapat menanggapi masalah-masalah kesehatan reproduktif dan Hak? Jika ada persoalan, saran apa yang anda dapat berikan?
- 3) Diskusikanlah peranan media dalam mempromosikan Resolusi Dewan Keamanan 1325 dalam situasi dimana anda bekerja?
- 4) Mendiskusikan pelanggaran hak-hak asasi perempuan dalam situasi konflik militer. Bagaimana perempuan dapat lebih efektif mencari solusi yang berkelanjutan? Bagaimana PBB dan mekanisme lain dapat memberi bantuan?
- 5) Bagaimana perempuan dapat berpartisipasi secara efektif dalam manajemen pencegahan konflik, penyelesaian dan proses paska konflik?

Kesimpulan akhir menyatakan:

Perempuan dan anak-anak menderita atas konsekuensi dari kekerasan sistematis paling tinggi yang dikarenakan oleh kekuasaan yang diekspresikan lewat patriarkal, rasisme, fundamentalisme dan ketidaksetaraan sosial lainnya.

Praktek-praktek militer dan pasukan perdamaian di tempat-tempat konflik dan perang

memperburuk masalah-masalah kekerasan seksual dan fisik, keamanan, perdagangan manusia dan prostitusi serta menurunkan pengeluaran militer, dan sumber daya yang dapat disalurkan untuk pencegahan konflik dan membangun perdamaian.

Partisipasi yang murni dan efektif dari perempuan dalam penyelesaian konflik dan membangun perdamaian dan dalam semua level pengambilan kebijakan.

Pemerintah dan badan-badan yang bertanggungjawab harus memasukan isu jender dalam semua kebijakan nasional, sehingga perempuan dapat mengakses pekerjaan dengan upah yang sama dan melakukan kontrol terhadap sumber daya yang ada.

Penerapan dan ratifikasi deklarasi-deklarasi, konvensi-konvensi dan resolusi-resolusi seperti Resolusi Badan Keamanan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Opsional Protokol merupakan tindakan yang sangat diperlukan dalam menangani persoalan pelanggaran hak asasi perempuan.

Agar dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan bersamaan dengan pembangunan, harus ada transformasi dari kekuasaan patriakal, struktur sosial dan politik untuk mencapai persamaan jender, hak asasi perempuan dan keadilan dengan menggunakan pendidikan dan organisasi kolektif, perubahan perundang-undangan, pembangunan social, pergerakan social dan organisasi perempuan sebagai alat.

Selanjutnya memberikan tekanan bagi pemerintah serta institusi internasional untuk meningkatkan dan melindungi hak perempuan, membangun perdamaian dan memberikan instrument demi pembangunan yang berkelanjutan.

Sangat berguna bagi JSMP-WJU untuk belajar dari pengalaman organisasi lain yang bekerja pada bidang Hak Asasi Manusia bagi Perempuan dan Pembangunan Perempuan di Asia dan Timur Tengah.

Juga merupakan kesempatan baik untuk mempresentasikan pekerjaan kami di Timor Leste, dan menyampaikan kepada organisasi lain bahwa mereka tidak sendiri dalam memperjuangkan perdamaian dan persamaan, serta dapat selalu memberikan kontribusi kita.

Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Norwegia, kepada Forum Perempuan dan Pembangunan (FOKUS), dan organisasi pengacara perempuan atas dukungannya. Kami yakin bahwa komitmen mereka akan menjadi sebuah dasar yang akan menuntun program kami di masa mendatang.

Untuk Informasi Selanjut Dapat Menghubungi
Dra. Maria Agnes Bere
No Kontak : 7233723
Cordinator WJU